



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

doi.org/10.63822/j8x06t04

Hal. 1431-1440

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Struktur dan Fungsi Kepemimpinan Politik

Aida Yusuf¹, Alencia Muryati², Citra Dwi Rahayuningsih³, Nor Islamy⁴, Surya Sukti⁵
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya^{1,2,3,4,5}

*Email Korespodensi: aidayusf1101@gmail.com

Diterima: 25-05-2026 | Disetujui: 31-05-2026 | Diterbitkan: 02-06-2026

ABSTRACT

Leadership is a fundamental element in social life and political systems. In a social context, leadership is understood as the ability of an individual to influence, guide, and empower members of society in order to achieve common goals based on prevailing values and norms. Meanwhile, political leadership relates to the activities of power holders in decision-making processes and the implementation of public policies for the broader public interest. Political leadership requires not only managerial and strategic competence, but also moral integrity, as reflected in leadership concepts found in the Qur'an and Hadith. Furthermore, legitimacy is a crucial aspect of political leadership as it determines the extent to which a leader's authority is accepted and recognized by society. Legitimacy may derive from tradition, charisma, or rational-legal foundations. In modern democratic systems, legitimacy is generally obtained through constitutional mechanisms and public support. The structure of political leadership consists of formal and informal elements that are interconnected, while its functions include decision-making, direction-setting, social integration, political communication, and the maintenance of stability. Therefore, effective leadership requires synergy between legitimacy, institutional structure, and the proper implementation of functions in order to achieve social welfare and political stability.

Keywords: Leadership, Political Leadership, Legitimacy, Political Structure, Leadership Functions, Democracy, Social Values

ABSTRAK

Kepemimpinan merupakan elemen fundamental dalam kehidupan masyarakat dan sistem politik. Dalam konteks sosial, kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memberdayakan anggota masyarakat guna mencapai tujuan bersama berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Sementara itu, kepemimpinan politik berkaitan dengan aktivitas pemegang kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan publik demi kepentingan masyarakat luas. Kepemimpinan politik tidak hanya menuntut kemampuan manajerial dan strategis, tetapi juga integritas moral, sebagaimana tercermin dalam konsep-konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, legitimasi menjadi aspek penting dalam kepemimpinan politik karena menentukan sejauh mana kekuasaan seorang pemimpin diterima dan diakui oleh masyarakat. Legitimasi dapat bersumber dari tradisi, karisma, maupun dasar hukum yang rasional. Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi umumnya diperoleh melalui mekanisme konstitusional dan dukungan rakyat. Struktur kepemimpinan politik sendiri tersusun atas unsur formal dan informal yang saling berkaitan, sementara fungsinya meliputi pengambilan keputusan, pengarahan, integrasi sosial, komunikasi politik, dan pemeliharaan stabilitas. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif memerlukan sinergi antara legitimasi, struktur kelembagaan, serta pelaksanaan fungsi secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan dan stabilitas masyarakat.

Kata kunci: Kepemimpinan, Kepemimpinan Politik, Legitimasi, Struktur Politik, Fungsi Kepemimpinan, Demokrasi, Nilai Sosial.



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Yusuf, A., Muryati, A., Rahayuningsih, C. D., Islamy, N. ., & Sukti, S. . (2026). Struktur dan Fungsi Kepemimpinan Politik. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 1431-1440. <https://doi.org/10.63822/j8x06t04>



PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam setiap kelompok sosial, selalu dibutuhkan figur yang mampu mengarahkan, membimbing, serta mengoordinasikan anggota masyarakat agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif. Tanpa kepemimpinan yang baik, kehidupan sosial berpotensi mengalami disorganisasi, konflik, serta lemahnya pencapaian tujuan kolektif. Oleh karena itu, kajian tentang kepemimpinan menjadi penting dalam ilmu sosial maupun ilmu politik.

Dalam perkembangan masyarakat modern, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai jabatan formal, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi, pengaruh, dan legitimasi. Kepemimpinan masyarakat menuntut kemampuan membangun partisipasi, menjaga nilai dan norma, serta memberdayakan warga. Sementara itu, dalam ranah politik, kepemimpinan memiliki peran yang lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan kekuasaan, kebijakan publik, serta pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Kepemimpinan politik yang efektif harus memiliki dasar legitimasi yang kuat agar kekuasaan yang dijalankan dapat diterima oleh masyarakat.

Legitimasi ini tidak hanya diperoleh melalui mekanisme hukum dan prosedur demokrasi, tetapi juga melalui kinerja, integritas, dan komitmen terhadap nilai keadilan serta kesejahteraan umum. (Darmawan, 2013) Ketika legitimasi melemah, stabilitas politik dapat terganggu dan kepercayaan publik menurun. Selain legitimasi, (Studi et al., 2024) struktur dan fungsi kepemimpinan politik juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pemerintahan.

Struktur kepemimpinan mengatur pembagian kewenangan dalam sistem politik, sedangkan fungsi kepemimpinan berkaitan dengan peran nyata dalam mengarahkan, mempersatukan, dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian kepemimpinan dalam masyarakat, kepemimpinan politik, legitimasi, serta struktur dan fungsinya menjadi sangat relevan untuk dikaji guna memahami dinamika kepemimpinan dalam kehidupan sosial dan politik secara komprehensif.

Kepemimpinan yang efektif dalam masyarakat modern juga ditandai dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial yang dinamis. (Fazira et al., 2024) Globalisasi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban menuntut pemimpin untuk lebih responsif dan inovatif. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga kecerdasan emosional dan sosial dalam memahami kebutuhan masyarakat yang beragam. (Kariem et al., 2025) Dengan demikian, kepemimpinan tidak lagi bersifat otoriter, melainkan partisipatif dan kolaboratif.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam kepemimpinan, khususnya dalam konteks politik. Masyarakat saat ini semakin kritis dalam menilai kebijakan publik dan kinerja pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk terbuka dalam proses pengambilan keputusan serta bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dihasilkan. Transparansi ini akan memperkuat kepercayaan publik, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas politik dan keberlanjutan pemerintahan.

Lebih lanjut, kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan (*servant leadership*) juga semakin relevan dalam konteks pemerintahan modern. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. (Sihombing & Ri, 2025) Model kepemimpinan ini mendorong terciptanya pemerintahan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sehingga mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Metode studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kepemimpinan politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari berbagai literatur dianalisis secara sistematis untuk memahami konsep, teori, serta perkembangan pemikiran mengenai kepemimpinan dalam masyarakat dan kepemimpinan politik. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menginterpretasikan gagasanggagasan para ahli untuk kemudian disusun secara runtut dan komprehensif. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep kepemimpinan, legitimasi, struktur, dan fungsi kepemimpinan politik berdasarkan teori-teori yang telah berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kepemimpinan Politik

Kepemimpinan merupakan suatu proses memengaruhi individu atau kelompok agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam perspektif Islam, konsep kepemimpinan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Istilah-istilah seperti *ulil amri*, *khalifah*, *imam*, dan *wali* menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Seorang pemimpin dipandang sebagai wakil yang mengemban amanah untuk mengatur dan membimbing masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan keadilan.

Seorang pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan lebih dalam mengarahkan, membimbing, dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan mencakup berbagai aspek, seperti kemampuan mengorganisasi, menggerakkan, hingga mengendalikan aktivitas kelompok secara efektif. Dalam hal ini, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga dengan tanggung jawab dalam menciptakan kerja sama yang harmonis dan produktif di tengah masyarakat.

Dalam Islam, pemimpin ideal memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai keteladanan, seperti kedekatan kepada Tuhan, sifat amanah, keadilan, kebijaksanaan, serta wawasan yang luas. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam kepemimpinan Nabi Muhammad saw. yang mengedepankan sifat *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*. Selain itu, konsep kepemimpinan modern juga mengenal prinsip-prinsip seperti loyalitas, kemampuan mendidik, memberikan arahan, dan kedisiplinan yang terangkum dalam konsep LEAD.

Berbagai teori kepemimpinan telah dikembangkan untuk memahami bagaimana seorang pemimpin dapat menjalankan perannya secara efektif. Teori kelebihan menekankan pada keunggulan individu baik secara intelektual, spiritual, maupun fisik. Sementara itu, teori sifat menyoroti karakteristik pribadi seperti keadilan, kepercayaan diri, serta kemampuan komunikasi. Pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Keith Davis menekankan pentingnya kecerdasan, kedewasaan emosional, motivasi, serta kemampuan menjalin hubungan sosial dalam kepemimpinan.



Selain itu, terdapat pula teori-teori lain seperti teori keturunan, karismatik, bakat, sosial, kelompok, hingga teori situasional dan kontingensi. Teori-teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh faktor bawaan, tetapi juga oleh situasi dan lingkungan yang dihadapi. Dalam konteks politik, kepemimpinan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, kepemimpinan (Studi et al., 2024) politik memiliki beberapa model, salah satunya adalah negarawan yang mengutamakan kepentingan umum serta memiliki visi jangka panjang. Namun, terdapat pula tipe pemimpin seperti demagog yang cenderung memanfaatkan emosi masyarakat demi kepentingan pribadi, serta politisi yang terkadang mengorbankan prinsip demi mempertahankan kekuasaan. Di sisi lain, terdapat konsep *citizen leader*, yaitu individu yang mampu memberikan pengaruh besar dalam pemerintahan tanpa harus memiliki jabatan formal.

Dalam konteks masyarakat modern, kepemimpinan dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut pemimpin untuk mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data. Selain itu, pemimpin juga harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat agar kebijakan yang diambil dapat dipahami dan diterima secara luas.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam kepemimpinan saat ini. Masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah sehingga pemimpin dituntut untuk terbuka serta bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik serta menciptakan stabilitas sosial dan politik yang berkelanjutan.

Selain itu, konsep kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan semakin relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin tidak lagi hanya dipandang sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Legitimasi Kepemimpinan Politik

Legitimasi kepemimpinan politik merupakan konsep penting dalam ilmu politik yang menjelaskan tingkat penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan seorang pemimpin. Menurut Max Weber, legitimasi muncul dari kepercayaan masyarakat terhadap dasar kewenangan yang dimiliki pemimpin. Ia mengklasifikasikan legitimasi ke dalam tiga bentuk, yaitu legitimasi tradisional yang bersumber dari adat dan kebiasaan, legitimasi karismatik yang berasal dari daya tarik pribadi pemimpin, serta legitimasi rasional-legal yang didasarkan pada aturan hukum. Dalam sistem negara modern, legitimasi rasional-legal menjadi dominan karena kepemimpinan berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem demokrasi, legitimasi politik umumnya diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemimpin yang terpilih secara demokratis memiliki legitimasi formal karena mendapatkan mandat dari rakyat. (Tidak et al., 2025) Namun, legitimasi tidak hanya terbatas pada aspek prosedural, melainkan juga mencakup dimensi substantif. Artinya, seorang pemimpin tidak cukup hanya dipilih secara sah, tetapi juga harus mampu menjalankan pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat agar tetap memperoleh dukungan publik.

Legitimasi juga sangat berkaitan dengan kinerja pemerintahan dan tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika pemimpin mampu menciptakan stabilitas, meningkatkan kesejahteraan, serta menegakkan hukum



secara konsisten, maka legitimasi akan semakin kuat. Sebaliknya, praktik seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan dapat melemahkan legitimasi dan memicu krisis kepercayaan. Dalam banyak kasus, krisis legitimasi bahkan dapat berujung pada konflik politik dan ketidakstabilan pemerintahan.

Secara teoritis, legitimasi dapat dipahami sebagai hasil dari kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah. Gagasan ini dipengaruhi oleh pemikiran John Locke yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah bersumber dari persetujuan rakyat (*consent of the governed*). Apabila pemerintah gagal melindungi hak-hak dasar warga negara, maka legitimasi kekuasaan dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum menjadi elemen penting dalam menjaga legitimasi kepemimpinan politik.

Dalam konteks Indonesia, legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilihan umum, tetapi juga oleh kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi dan ideologi negara, yaitu Pancasila. Kepemimpinan yang mencerminkan prinsip demokrasi (Politik et al., 2018), keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, legitimasi politik merupakan perpaduan antara dasar hukum, dukungan rakyat, kinerja pemerintah, serta komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, dalam perkembangan politik modern, legitimasi juga dipengaruhi oleh peran media dan teknologi informasi. Arus informasi yang cepat membuat masyarakat lebih mudah mengakses dan menilai kinerja pemimpin. Hal ini menuntut pemimpin untuk lebih transparan dan responsif terhadap kritik publik. Jika tidak, legitimasi dapat dengan cepat menurun akibat tekanan opini publik yang berkembang di ruang digital.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi politik. Keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui pemilu, musyawarah, maupun kontrol sosial, akan meningkatkan rasa memiliki terhadap pemerintahan. Dengan demikian, legitimasi tidak hanya dibangun dari atas (top-down), tetapi juga dari bawah (bottom-up) melalui partisipasi aktif masyarakat.

Terakhir, legitimasi kepemimpinan (Rambe et al., 2025) politik yang kuat akan berdampak pada stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Pemerintah yang memiliki legitimasi tinggi cenderung lebih mudah dalam menjalankan kebijakan dan memperoleh dukungan publik. Sebaliknya, lemahnya legitimasi dapat menghambat proses pemerintahan serta menimbulkan resistensi dari masyarakat. Oleh karena itu, menjaga legitimasi merupakan tanggung jawab utama setiap pemimpin dalam sistem politik modern.

Hubungan Antar Lembaga Negara

Hubungan antar lembaga negara merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan. (Robuwan, 2018) Dalam suatu negara, kekuasaan tidak hanya terpusat pada satu lembaga, melainkan didistribusikan kepada beberapa institusi seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan adanya mekanisme pengawasan antar lembaga.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, hubungan antar lembaga negara didasarkan pada prinsip *checks and balances*, yaitu saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Setiap lembaga memiliki kewenangan tertentu



yang diatur dalam konstitusi, namun tetap dapat dikontrol oleh lembaga lain agar berjalan sesuai dengan hukum dan kepentingan publik.

Lembaga eksekutif memiliki fungsi utama dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang.(Artikel, 2025) Dalam menjalankan tugasnya, eksekutif tidak bekerja secara mandiri, melainkan harus berkoordinasi dengan legislatif, terutama dalam hal penyusunan kebijakan dan anggaran. Sementara itu, lembaga legislatif berperan dalam membuat undang-undang serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif.

Di sisi lain, lembaga yudikatif memiliki peran sebagai penegak hukum dan penjaga konstitusi. Lembaga ini bertugas untuk mengadili sengketa hukum serta memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, lembaga yudikatif juga memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi guna menjaga supremasi hukum.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antar lembaga negara mengalami perubahan signifikan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen tersebut memperkuat sistem demokrasi dengan memperjelas pembagian kekuasaan serta memperkuat fungsi pengawasan. Lembaga-lembaga negara seperti DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung memiliki kedudukan yang sejajar sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Selain hubungan formal yang diatur dalam konstitusi, hubungan antar lembaga negara juga mencakup kerja sama dalam praktik pemerintahan. Koordinasi yang baik antar lembaga sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan tidak saling bertentangan. Tanpa adanya sinergi, pelaksanaan pemerintahan dapat mengalami hambatan yang berdampak pada pelayanan publik.

Dengan demikian, hubungan antar lembaga negara merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Sistem yang seimbang dan saling mengawasi akan menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan hubungan antar lembaga negara menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Struktur dan Fungsi Kepemimpinan politik

Struktur dan fungsi kepemimpinan politik merupakan elemen penting dalam kajian ilmu politik karena berkaitan dengan cara kekuasaan disusun, didistribusikan, dan dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan. Kepemimpinan politik tidak hanya berfokus pada sosok pemimpin, tetapi juga mencakup posisi, kewenangan, serta hubungan antar lembaga dalam sistem politik. Dalam negara demokrasi, struktur kepemimpinan umumnya terbagi ke dalam cabang kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki fungsi masing-masing. Pembagian ini bertujuan menciptakan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Secara umum, struktur kepemimpinan politik terdiri atas unsur formal dan informal. Unsur formal meliputi lembaga-lembaga negara seperti presiden, kabinet, parlemen, dan lembaga peradilan. Sementara itu, unsur informal mencakup partai politik, kelompok kepentingan, tokoh masyarakat, serta opini publik yang turut memengaruhi proses politik.(Tribun & Email, 2017) Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam suatu sistem yang kompleks dan saling berkaitan. Struktur yang jelas akan membantu memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi dan norma yang berlaku.



Fungsi kepemimpinan politik berkaitan dengan peran yang dijalankan oleh pemimpin dalam sistem tersebut. Salah satu fungsi utama adalah pengambilan keputusan, yaitu menentukan kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat luas. Selain itu, pemimpin juga berperan sebagai penentu arah pembangunan dengan menetapkan visi dan strategi negara. (Kepemimpinan, 2015) Fungsi lainnya adalah integratif, yakni menyatukan berbagai kepentingan masyarakat agar tetap berada dalam kerangka tujuan nasional.

Selain itu, kepemimpinan politik juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan, menjelaskan program kerja, serta menyerap aspirasi rakyat. (Pembentukan & Publik, n.d.) Dalam hal ini, kemampuan komunikasi politik menjadi faktor penting dalam keberhasilan kepemimpinan. Di samping itu, pemimpin juga memiliki fungsi legitimasi, yaitu menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap transparan, akuntabel, dan adil dalam menjalankan pemerintahan.

Secara keseluruhan, struktur dan fungsi kepemimpinan politik memiliki keterkaitan yang erat. Struktur memberikan kerangka kelembagaan dan aturan yang menjadi dasar dalam menjalankan kekuasaan, sedangkan fungsi menunjukkan bagaimana peran tersebut diimplementasikan dalam praktik. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal dalam kerangka sistem yang demokratis dan konstitusional, sehingga mampu menciptakan stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangan sistem politik modern, struktur kepemimpinan juga semakin dipengaruhi oleh dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi. Pemimpin tidak hanya dituntut untuk memahami kondisi domestik, tetapi juga harus mampu merespons perubahan global yang dapat memengaruhi kebijakan nasional. Hal ini menuntut adanya koordinasi yang lebih luas, baik antar lembaga negara maupun dengan aktor internasional.

Selain itu, fungsi kepemimpinan politik juga berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan partisipasi. Pemimpin diharapkan tidak hanya mengambil keputusan secara sepihak, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Partisipasi publik ini penting untuk meningkatkan legitimasi serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.

Terakhir, kepemimpinan politik yang efektif juga ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola konflik dan menjaga stabilitas sosial. Dalam masyarakat yang plural, perbedaan kepentingan sering kali tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu menjadi mediator yang adil serta mampu menciptakan solusi yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Dengan demikian, kepemimpinan politik tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penjaga persatuan dan stabilitas negara.

SIMPULAN

kepemimpinan politik merupakan proses penting dalam mengarahkan dan memengaruhi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam konteks umum maupun dalam perspektif Islam. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam Islam, pemimpin dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keteladanan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.



Selain itu, kepemimpinan yang efektif ditentukan oleh berbagai faktor, baik dari segi kemampuan pribadi maupun situasi yang dihadapi. Berbagai teori kepemimpinan menunjukkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya berasal dari bakat atau keturunan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakter, lingkungan, serta kemampuan beradaptasi. Dalam konteks modern, pemimpin dituntut untuk responsif terhadap perubahan, mampu mengambil keputusan berbasis data, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.

Dalam ranah politik, kepemimpinan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat. Model kepemimpinan yang ideal adalah yang mengutamakan kepentingan umum, memiliki visi jangka panjang, serta mampu menjaga integritas. Sebaliknya, kepemimpinan yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan merusak tatanan politik.

Legitimasi menjadi faktor kunci dalam keberlangsungan kepemimpinan politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber, legitimasi dapat bersumber dari tradisi, karisma, maupun hukum. Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi (Mustikasari, 2024) umumnya diperoleh melalui pemilihan umum, namun juga harus didukung oleh kinerja nyata, keadilan, serta komitmen terhadap kepentingan rakyat. Tanpa legitimasi yang kuat, pemerintahan akan rentan terhadap krisis kepercayaan dan instabilitas.

Hubungan antar lembaga negara juga menjadi fondasi penting dalam sistem politik yang sehat. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menciptakan mekanisme checks and balances yang mencegah penyalahgunaan wewenang. Sinergi dan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan agar kebijakan dapat berjalan efektif serta tetap sesuai dengan konstitusi dan kepentingan publik.

Akhirnya, struktur dan fungsi kepemimpinan politik menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh individu pemimpin, tetapi juga oleh sistem yang mendukungnya. Kepemimpinan yang baik harus mampu menjalankan fungsi pengambilan keputusan, komunikasi, integrasi, dan pengelolaan konflik secara optimal. Dengan demikian, kepemimpinan politik yang efektif, legitimatif, dan terstruktur akan mampu menciptakan stabilitas, keadilan, serta kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel, I. (2025). *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*. 2(7), 1340–1352.
- Darmawan, D. (2013). *PRE-CONDITIONS FOR ENHANCING THE LEGITIMACY OF GOVERNANCE*. 47–62.
- Fazira, G., Studi, P., Islam, F., Ushuluddin, F., & Islam, U. (2024). *PARADIGMA : JURNAL KALAM DAN FILSAFAT Prodi Aqidah dan Filsafat Islam , Fakultas Ushuluddin Kepemimpinan Politik Menurut Raja Ali Haji*. 6(2), 163–172. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v6i02.37175>
- Kariem, M. Q., Alief, M., Putra, A., & Ginting, A. (2025). *Mewujudkan Legitimasi Kultural dalam Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X*. 10(3), 594–605.
- Kepemimpinan, P. (2015). *Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia : Kendala*. April.
- Mustikasari, F. (2024). *Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial : Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer*. 2(3), 558–565.
- Pembentukan, D., & Publik, K. (n.d.). *No Title*. 511–518.



- Politik, P. D. P., Dayak, S., Anyan, M. A., Dgl, L., Ilmu, F., Politik, I., Kristen, U., & Raya, P. (2018). *Legitimasi kekuasaan dan hubungan penguasa-rakyat dalam pemikiran politik suku dayak ma'anyan*. 5415, 46–60. <https://doi.org/10.22146/kawistara.28082>
- Rambe, A. S., Dinar, Y. P., & Sajida, I. (2025). *Hubungan antara Kepemimpinan dan Komunikasi Politik*. 5(2), 450–457.
- Robuwan, R. (2018). *Redistribusi kekuasaan negara dan hubungan antar lembaga negara di indonesia*. XII(1).
- Sihombing, D. N., & Ri, U. P. (2025). *Pemakzulan Dalam Demokrasi Presidensial Indonesia : Antara Legalitas Konstitusional dan Legitimasi Politik*. 3(1).
- Studi, P., Sosialogi, P., Keguruan, F., Pendidikan, I., Mataram, U., Studi, P., Komputer, I., Teknik, F., & Bumigora, U. (2024). *Legitimasi Pemerintah dalam Perspektif Demokrasi Modern : Analisis atas Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Politik*. 243–251.
- Tidak, P., Pejabat, E., & Krisis, D. A. N. (2025). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 12(11), 4336–4342.
- Tribun, H., & Email, B. (2017). *Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia*. 6(2), 137–155.